



**Dampak Kemiskinan terhadap Partisipasi dan Kualitas Pendidikan di Indonesia:  
Tinjauan Literatur Sistematis Periode 2015–2025  
Dita Tri Mulyani<sup>1\*</sup>, Dhea Zahra Zahira<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Samawa, Indonesia

\*E-mail: dita@samawa.ac.id

**Abstrak**

Riset tentang kemiskinan dan pendidikan di Indonesia telah berlangsung cukup panjang, namun hampir selalu bergerak di jalurnya masing-masing: sebagian mengukur pengaruh pendidikan terhadap penurunan kemiskinan, sebagian menelusuri determinan putus sekolah, dan sebagian lagi mendokumentasikan ketimpangan kualitas antardaerah. Kajian yang secara eksplisit menyatukan kelima dimensi dampak — partisipasi, risiko putus sekolah, kualitas pendidikan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan digital — dalam satu kerangka analitis yang menunjukkan bagaimana dimensi-dimensi itu bekerja saling memperkuat, belum tersedia dalam literatur Indonesia. Kajian ini mengisi celah tersebut melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 28 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara 2015 dan 2025 dari Google Scholar, SINTA, Garuda, dan DOAJ. Tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau setara 25,22 juta jiwa berkorelasi langsung dengan pola partisipasi pendidikan yang menyusut dari Angka Partisipasi Kasar SD 104,76% hingga hanya 84,13% di SMA — selisih yang mencerminkan penyaringan ekonomi yang berlangsung jauh sebelum ujian akhir. Argumen sentral kajian ini adalah bahwa kemiskinan tidak bekerja sebagai hambatan tunggal melainkan melalui pola compounding disadvantage, di mana setiap dimensi memperburuk dimensi lainnya, sehingga intervensi parsial tidak akan pernah cukup untuk memutus mekanisme itu.

**Kata Kunci:** kemiskinan; partisipasi pendidikan; siklus kemiskinan antargenerasi; kesenjangan digital; tinjauan literatur sistematis

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin pendidikan sebagai hak setiap warga negara, tetapi kemiskinan bekerja diam-diam sebagai mekanisme penyaring yang mencabut hak itu secara sistematis dari mereka yang paling membutuhkannya (Suhendar et al., 2024). Kemiskinan bukan hanya soal uang yang tidak cukup untuk membayar SPP; ia memengaruhi kondisi psikologis anak sebelum berangkat ke sekolah, menentukan kualitas sarapan yang berpengaruh pada kemampuan konsentrasi, dan membatasi waktu efektif belajar karena anak harus membantu pekerjaan keluarga (Loen et al., 2024; Wideasanti et al., 2023). Memahami kedalaman hubungan itu adalah prasyarat epistemologis untuk merancang kebijakan yang tidak hanya bermaksud baik, tetapi benar-benar efektif (World Bank, 2023).

Data Badan Pusat Statistik (2024) menempatkan 25,22 juta jiwa Indonesia di bawah garis kemiskinan, setara tingkat kemiskinan nasional 9,03%. Angka itu berkorelasi langsung dengan pola partisipasi pendidikan yang menyusut secara konsisten di setiap jenjang: Angka Partisipasi Kasar SD mencapai 104,76%, turun ke 90,31% di SMP, dan merosot ke 84,13% di SMA (Kemendikbud, 2023). Selisih hampir 20 persen poin antara SD dan SMA bukan angka administratif; setiap persennya merepresentasikan keputusan ekonomi yang mengakhiri pendidikan anak sebelum waktunya (Suhendar et al., 2024; Boari et al., 2024). Pola penyaringan ini bersifat prediktabel dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah: provinsi dengan kemiskinan lebih tinggi secara konsisten memiliki APK menengah lebih rendah (Surbakti et al., 2023). Yang paling mengkhawatirkan adalah sifatnya yang self-perpetuating: anak yang meninggalkan sekolah lebih awal memasuki pasar kerja dalam posisi



tawar yang lemah, yang pada gilirannya meneruskan kemiskinan ke generasi berikutnya melalui jalur keterbatasan modal manusia (Sihombing et al., 2024; Hanushek & Woessmann, 2020).

Sejumlah kajian telah mendokumentasikan berbagai sisi dari masalah ini dengan cukup baik. Firmansyah dan Khairunnisa (2023) serta Afrianto (2024) membuktikan secara ekonometrik bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di tingkat provinsi. Widiasanti et al. (2023) dan Haq et al. (2024) menelusuri dinamika putus sekolah di level individu dan komunitas. Darmuji et al. (2024) serta Togatorop et al. (2024) mendokumentasikan kesenjangan kualitas pendidikan yang diproduksi oleh ketimpangan ekonomi antardaerah. Yang tidak pernah dilakukan adalah mensintesis kelima dimensi itu — partisipasi, putus sekolah, kualitas pendidikan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan digital — dalam satu kerangka yang menunjukkan bagaimana setiap dimensi memperburuk dimensi lainnya; ketiadaan sintesis semacam itulah yang kajian ini sebut sebagai *research gap* utama yang direspons (Nurrahmah et al., 2024; Prasetyo & Nugroho, 2021). Selama dimensi-dimensi itu terus dipelajari secara terpisah, kebijakan yang dihasilkan berisiko hanya menyentuh satu lapisan sambil membiarkan lapisan lain tetap bekerja (Yanti & Lestari, 2025).

Kajian ini menjawab celah itu melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 28 artikel yang dipublikasikan antara 2015 dan 2025 (Snyder, 2019; Booth et al., 2021; Xiao & Watson, 2019). Novelty-nya bukan pada data baru, melainkan pada argumen bahwa kemiskinan beroperasi melalui *compounding disadvantage* — sebuah mekanisme di mana setiap dimensi memperkuat dimensi lain sehingga intervensi parsial tidak pernah cukup untuk memutus siklus yang ada (Alkire & Foster, 2011).

## **METODE**

Pendekatan tinjauan literatur sistematis dipilih karena memungkinkan identifikasi pola lintas studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian empiris tunggal (Snyder, 2019). Protokol tinjauan mengikuti panduan Xiao dan Watson (2019) serta Booth et al. (2021), yang menekankan transparansi dalam setiap tahap seleksi dan analisis sebagai syarat reproduisibilitas ilmiah. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi Paul dan Criado (2020) yang mensyaratkan keterbukaan tentang kriteria inklusi, proses pencarian, dan keterbatasan metodologis sebagai standar kualitas tinjauan literatur dalam ilmu sosial.

Penelusuran dilakukan pada empat database — Google Scholar, SINTA, Garuda, dan DOAJ — menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang dikombinasikan dengan operator Boolean AND untuk mempersempit hasil (Xiao & Watson, 2019). Kata kunci Indonesia mencakup kemiskinan, akses pendidikan, ketimpangan pendidikan, putus sekolah, kualitas pendidikan, dan kesenjangan digital; padanannya dalam bahasa Inggris meliputi *poverty and education Indonesia*, *educational inequality*, *school dropout poverty*, dan *digital divide education* (Booth et al., 2021).

Kriteria seleksi ditetapkan sebelum penelusuran dimulai — bukan sesudahnya — sebagai jaminan bahwa proses inklusi tidak dipengaruhi oleh bias konfirmasi peneliti (Paul & Criado, 2020). Artikel dimasukkan jika diterbitkan antara 2015 dan 2025, berbahasa Indonesia atau Inggris, membahas konteks Indonesia, terbit di jurnal terindeks, tersedia dalam teks penuh, dan relevan dengan minimal satu dari lima dimensi kajian ini (Booth et al., 2021). Artikel yang dikecualikan adalah yang diterbitkan sebelum 2015, tidak membahas konteks Indonesia, berupa opini atau editorial, atau hanya tersedia dalam format abstrak (Snyder, 2019).



Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel

<b>Kriteria Inklusi</b>	<b>Kriteria Eksklusi</b>
Diterbitkan periode 2015–2025	Diterbitkan sebelum 2015
Berbahasa Indonesia atau Inggris	Tidak tersedia dalam kedua bahasa tersebut
Membahas kemiskinan dan/atau pendidikan di Indonesia	Tidak membahas konteks Indonesia secara spesifik
Terbit di jurnal terindeks atau prosiding bereputasi	Opini, editorial, atau karya non-ilmiah
Tersedia teks lengkap (full text)	Hanya tersedia abstrak
Relevan dengan minimal satu dimensi kajian	Topik di luar ruang lingkup kajian

Penelusuran awal menghasilkan 87 artikel dari keempat database (Snyder, 2019). Setelah skrining judul dan abstrak, 36 artikel dieliminasi karena tidak relevan dengan konteks Indonesia atau berada di luar rentang waktu yang ditetapkan, menyisakan 51 artikel (Booth et al., 2021). Uji kelayakan teks lengkap mengeliminasi 23 artikel tambahan karena duplikat, teks tidak tersedia penuh, atau tidak memenuhi standar metodologis minimum, sehingga 28 artikel memenuhi seluruh kriteria dan digunakan dalam analisis (Xiao & Watson, 2019). Empat dari 28 artikel tersebut adalah pustaka metodologis yang menjadi landasan pendekatan tinjauan ini, sementara 24 lainnya merupakan studi substantif tentang kemiskinan dan pendidikan di Indonesia (Paul & Criado, 2020).

Data dari 28 artikel dianalisis menggunakan pendekatan tematik induktif, di mana tema tidak ditentukan sebelumnya melainkan muncul dari pola yang berulang dalam temuan-temuan yang dikaji (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Lima tema yang teridentifikasi — partisipasi sekolah, risiko putus sekolah, kualitas pendidikan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan digital — kemudian dibandingkan secara lintas studi untuk mengidentifikasi konsensus, perbedaan metodologis, dan celah penelitian, dengan kualitas setiap artikel dinilai berdasarkan kejelasan metode, reliabilitas data, dan keteralihan temuan (Paul & Criado, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 28 artikel yang dikaji, semuanya mengonfirmasi bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap pendidikan — temuan yang dalam arti tertentu sudah diketahui (Prasetyo & Nugroho, 2021). Yang membuat kajian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya adalah cara membaca temuan-temuan itu secara bersamaan: Tabel 2 merangkum delapan studi kunci yang paling representatif, memperlihatkan ragam metode, lokasi, dan sudut pandang yang tersebar dalam literatur (Suhendar et al., 2024).

Tabel 2. Ringkasan Studi Kunci yang Dikaji

<b>No.</b>	<b>Penulis / Tahun</b>	<b>Metode</b>	<b>Lokasi / Sampel</b>	<b>Temuan Utama</b>
1	<b>Suhendar et al. (2024)</b>	Tinjauan literatur	Indonesia nasional	– Kemiskinan menghambat partisipasi melalui lebih dari sekadar biaya; norma budaya, jarak, dan beban kerja anak bekerja bersamaan.



No.	Penulis / Tahun	Metode	Lokasi / Sampel	Temuan Utama
2	<b>Firmansyah &amp; Khairunnisa (2023)</b>	Data panel, 34 provinsi	Indonesia, 2013–2021	Setiap satu tahun penambahan rata-rata lama sekolah menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.
3	<b>Haidir &amp; Setyari (2024)</b>	Probit, SUSENAS	Indonesia nasional	– Kualitas pendidikan yang diterima — bukan sekadar akses — menentukan peluang keluarga keluar dari poverty trap.
4	<b>Surbakti et al. (2023)</b>	Regresi data panel	Indonesia, 2015–2021	Daerah dengan APK SMA lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah secara konsisten.
5	<b>Widiasanti et al. (2023)</b>	Deskriptif kualitatif	Indonesia nasional	– Putus sekolah adalah keputusan ekonomi keluarga, bukan keputusan anak; tekanan bekerja adalah mekanisme utamanya.
6	<b>Togatorop et al. (2024)</b>	Regresi data panel	Sumatera Utara, 2017–2021	Kabupaten dengan kemiskinan di atas rata-rata provinsi memiliki angka putus sekolah yang secara statistis lebih tinggi.
7	<b>Sihombing et al. (2024)</b>	Error Correction Model	Indonesia, 2004–2023	Dampak rendahnya pendidikan pada kemiskinan bersifat persisten lintas dua dekade, bahkan setelah IPM dan pertumbuhan ekonomi dikendalikan.
8	<b>Alya et al. (2024)</b>	Tinjauan literatur	Indonesia nasional	– Learning loss siswa miskin selama pandemi lebih besar dan tidak pulih sepenuhnya setelah pembelajaran tatap muka dilanjutkan.

## Hasil

### A. Kemiskinan dan Partisipasi Sekolah: Seleksi yang Terjadi Sebelum Ujian

Penurunan APK dari 104,76% di SD menjadi 84,13% di SMA bukan sekadar statistik administratif; ia merupakan jejak dari keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat jutaan keluarga di Indonesia setiap tahunnya (Kemendikbud, 2023; Suhendar et al., 2024). Firmansyah dan Khairunnisa (2023), melalui analisis data panel terhadap 34 provinsi dalam rentang 2013–2021, menemukan bahwa setiap penambahan satu tahun rata-rata lama sekolah berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan secara statistis — dengan koefisien yang lebih besar dari perkiraan model-model sebelumnya. Surbakti et al. (2023) mengonfirmasi pola yang sama melalui regresi data panel periode 2015–2021: daerah dengan APK SMA lebih tinggi secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, meskipun besar efeknya bervariasi antarprovinsi. Boari et al. (2024), yang menganalisis data nasional dalam kerangka waktu yang lebih panjang, menemukan bahwa kesenjangan APK antara daerah kaya dan miskin tidak menyempit secara berarti selama periode observasinya, mengindikasikan bahwa mekanisme yang memproduksi kesenjangan itu tidak melemah dengan sendirinya tanpa intervensi yang terstruktur.

Haidir dan Setyari (2024) menambahkan dimensi yang lebih halus dan sering diabaikan: bukan hanya apakah anak bersekolah, melainkan seberapa baik pendidikan yang mereka terima di sana. Melalui model probit berbasis data individual SUSENAS, mereka menemukan bahwa keluarga miskin yang anaknya bersekolah di institusi bermutu rendah



memiliki probabilitas keluar dari kemiskinan yang tidak berbeda secara signifikan dari keluarga yang anaknya tidak bersekolah sama sekali — sebuah temuan yang menggeser pertanyaan kebijakan dari "apakah anak bersekolah?" menjadi "belajar apa anak itu di sekolah?" (Haidir & Setyari, 2024).

Program Indonesia Pintar yang menjangkau lebih dari 18 juta penerima pada 2023 merepresentasikan komitmen finansial yang tidak kecil dari pemerintah (Kemendikbud, 2023). Namun Suhendar et al. (2024) menemukan bahwa hambatan non-finansial — jarak ke sekolah, norma gender yang merendahkan nilai pendidikan anak perempuan, dan kebutuhan anak untuk membantu pekerjaan keluarga — tetap aktif sebagai penyaring yang tidak tersentuh oleh bantuan tunai. Loen et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kemiskinan menghambat akses layanan dasar secara kumulatif sehingga mengatasi hambatan finansial saja tidak membebaskan keluarga dari tekanan struktural yang membatasi pilihan pendidikan anak mereka; implikasi yang serupa juga ditemukan oleh Yanti dan Lestari (2025) dalam analisis pola kemiskinan di Indonesia.

### **B. Putus Sekolah: Keputusan yang Tidak Dibuak oleh Anak**

Angka putus sekolah paling akurat dipahami bukan sebagai kegagalan individual, melainkan sebagai rasionalitas ekonomi keluarga yang mengalokasikan sumber daya yang langka (Widiasanti et al., 2023). Widiasanti et al. (2023) mendokumentasikan bahwa tekanan ekonomi keluarga adalah pemicu dominan keputusan putus sekolah: anak tidak berhenti sekolah karena tidak ingin belajar, tetapi karena keluarga menilai kontribusi ekonomi anak yang bekerja lebih mendesak daripada manfaat jangka panjang pendidikan yang tidak terasa segera. Haq et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga merupakan faktor yang paling konsisten disebutkan dalam studi-studi tentang putus sekolah di Indonesia. Prasetyo dan Nugroho (2021) menambahkan bahwa keputusan ini cenderung bersifat ireversibel: anak yang meninggalkan sistem pendidikan pada usia tertentu jarang kembali karena biaya peluang yang semakin besar seiring bertambahnya usia. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa angka putus sekolah tidak akan bisa diatasi hanya dengan memperbaiki kualitas sekolah atau menyediakan beasiswa, karena akar masalahnya ada di luar tembok sekolah (Loen et al., 2024).

Dari sudut pandang distribusi geografis, Togatorop et al. (2024) menemukan bahwa di Sumatera Utara, kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi memiliki angka putus sekolah yang secara statistik jauh lebih tinggi. Boari et al. (2024) mengonfirmasi pola serupa dalam analisis nasional, meskipun besaran efeknya bervariasi antardaerah — sebuah variasi yang dengan tegas menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang seragam tidak akan bekerja secara merata di semua konteks lokal (Boari et al., 2024). Suherman dan Sakti (2024) menambahkan bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah adalah prediktor kesenjangan pendidikan yang lebih kuat dibandingkan variabel pengangguran, mengindikasikan bahwa memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal tanpa mengatasi stagnasi ekonomi setempat akan menghasilkan sekolah yang lebih baik di atas fondasi yang tetap rapuh.

Dampak jangka panjang putus sekolah terdokumentasi dengan baik oleh Sihombing et al. (2024), yang menggunakan Error Correction Model untuk data 2004–2023 dan menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi persisten dengan kemiskinan dan pengangguran pada masa dewasa, bahkan setelah variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi dikendalikan. Hanushek dan Woessmann (2020) menyebut mekanisme ini sebagai "education-income trap" — kondisi di mana rendahnya pendidikan memproduksi rendahnya pendapatan, yang kemudian membatasi akses anak-anak generasi berikutnya terhadap pendidikan berkualitas, sehingga siklusnya bersifat trans-generasional.



### **C. Kualitas Pendidikan: Apa yang Diterima di Dalam Sekolah**

Bahwa anak dari keluarga miskin yang berhasil masuk sekolah sering menerima pendidikan dengan mutu yang lebih rendah adalah salah satu temuan paling konsisten sekaligus paling kurang mendapat perhatian dalam diskursus kebijakan (Darmuji et al., 2024). Afrianto (2024) dan Sholeh (2023) menemukan bahwa sekolah-sekolah di area dengan konsentrasi kemiskinan tinggi cenderung memiliki keterbatasan fasilitas fisik, rasio guru-murid yang tidak menguntungkan, dan lebih sedikit tenaga pendidik berkualifikasi dibandingkan sekolah di area dengan ekonomi lebih baik. Darmuji et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pendidikan dan ketimpangan pendapatan bersifat dua arah: pendidikan bermutu rendah memperbesar ketimpangan ekonomi masa depan, sementara ketimpangan ekonomi yang sudah ada terus menghalangi investasi dalam mutu pendidikan — sebuah equilibrium buruk yang tidak dapat diinterupsi tanpa intervensi dari luar sistemnya. World Bank (2023) dalam laporannya tentang sektor pendidikan Indonesia mengonfirmasi bahwa kesenjangan kualitas antara sekolah di daerah kaya dan miskin masih substansial, bahkan setelah memperhitungkan perbedaan dalam anggaran per siswa.

Dimensi yang lebih jarang dibicarakan dalam literatur Indonesia adalah dampak psikologis kemiskinan terhadap proses belajar. Reardon (2011), dalam analisis tentang kesenjangan prestasi akademik di Amerika Serikat, mengidentifikasi bahwa kondisi di luar sekolah — nutrisi yang tidak memadai, tingkat stres kronis akibat ketidakpastian ekonomi, dan terbatasnya stimulasi kognitif di rumah — berkontribusi lebih besar terhadap kesenjangan prestasi daripada perbedaan kualitas sekolah itu sendiri. Loen et al. (2024) dan Firmansyah dan Khairunnisa (2023) menemukan pola serupa dalam konteks Indonesia: tekanan ekonomi yang dialami orang tua secara langsung memengaruhi kondisi psikologis anak, yang pada gilirannya memengaruhi motivasi dan kapasitas belajarnya. Widiasanti et al. (2023) menambahkan bahwa pembagian waktu antara belajar dan bekerja yang dialami anak-anak dari keluarga miskin — baik di dalam maupun di luar rumah — secara sistematis mengurangi intensitas dan efektivitas belajar mereka. Kombinasi dari faktor-faktor ini — keterbatasan fasilitas sekolah, tekanan psikologis, dan pembagian waktu yang tidak optimal — menciptakan kesenjangan kompetensi yang tidak bisa dipersempit hanya melalui reformasi kurikulum atau program di dalam sekolah (Haq et al., 2024).

### **D. Kesenjangan Antarwilayah: Kemiskinan yang Diperkuat oleh Geografi**

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat pembangunan yang sangat tidak merata memberikan konteks di mana dampak kemiskinan terhadap pendidikan bukan sekadar bertambah dengan faktor geografis, melainkan berlipat ganda (Togatorop et al., 2024). Togatorop et al. (2024) mendokumentasikan bagaimana kabupaten tertinggal di Sumatera Utara menghadapi kombinasi yang jarang disebut dalam satu napas: kemiskinan yang tinggi, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, dan rasio guru berkualifikasi yang rendah — semua bekerja bersamaan pada populasi yang sama. Boari et al. (2024), yang menganalisis data panel seluruh provinsi Indonesia, mengonfirmasi bahwa daerah dengan PDRB per kapita rendah secara konsisten memiliki APK jenjang menengah di bawah rata-rata nasional, dan kesenjangan ini tidak menyempit secara signifikan selama periode observasinya.

Suherman dan Sakti (2024) menemukan bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah adalah prediktor kesenjangan pendidikan yang lebih kuat dibandingkan tingkat pengangguran, suatu temuan yang memiliki implikasi kebijakan yang cukup keras. Mengintegrasikan intervensi pendidikan dengan strategi pembangunan ekonomi regional yang berpihak pada daerah tertinggal — bukan sekadar membangun gedung sekolah — adalah konsekuensi logis dari temuan ini, meskipun jarang dilakukan dalam praktik kebijakan yang sesungguhnya (Suherman & Sakti, 2024; Prasetyo & Nugroho, 2021).



### **E. Kesenjangan Digital: Dimensi Baru yang Mengunci Dimensi Lama**

Data SUSENAS 2023 menunjukkan penetrasi internet 76,7% di perkotaan berbanding 58,2% di pedesaan, dan ketika disilangkan dengan kelompok pendapatan, ketersediaan internet yang memadai di kalangan kuintil terbawah hanya mencapai 43% (BPS, 2023). Alya et al. (2024) mendokumentasikan bahwa selama pembelajaran jarak jauh pada 2020–2021, siswa dari keluarga miskin mengalami learning loss yang jauh lebih parah dibandingkan kelompok ekonomi mampu, karena keterbatasan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Yang paling mengkhawatirkan dari temuan Alya et al. (2024) bukan besarnya sendiri, melainkan persistensinya: Surbakti et al. (2023) menemukan bahwa kesenjangan prestasi yang melebar selama pandemi tidak pulih secara penuh meskipun pembelajaran tatap muka telah dilanjutkan.

Kesenjangan digital dalam konteks ini bukan isu teknis yang berdiri sendiri; ia berfungsi sebagai pengganda dari dimensi-dimensi lain yang sudah ada (Nurrahmah et al., 2024). Anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil dengan sekolah berkualitas rendah — yang sudah menanggung beban dari tiga dimensi sekaligus — kini juga kehilangan akses ke sumber belajar alternatif berbasis digital yang secara potensial bisa mengkompensasi keterbatasan instruksi di sekolah (Alya et al., 2024; Surbakti et al., 2023). UNESCO (2022) dalam laporan pemantauan pendidikan globalnya menegaskan bahwa kesenjangan digital dalam pendidikan bukan sekadar kesenjangan teknologi, melainkan kesenjangan akses terhadap pengetahuan yang semakin terdigitalisasi. World Bank (2023) menambahkan bahwa kompetensi digital yang tidak berkembang pada masa sekolah akan menjadi pembatas mobilitas sosial yang persisten, karena pasar kerja semakin mensyaratkan kecakapan digital sebagai prasyarat bahkan untuk pekerjaan yang tidak secara eksplisit berbasis teknologi. Kesenjangan digital, dalam kerangka analisis kajian ini, adalah dimensi kelima yang mengunci keempat dimensi sebelumnya lebih rapat — bukan menambah beban secara aditif, melainkan secara multiplikatif (Alkire & Foster, 2011; Hanushek & Woessmann, 2020).

### **Pembahasan**

Kelima dimensi yang diidentifikasi dalam tinjauan ini — partisipasi, putus sekolah, kualitas pendidikan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan digital — tidak beroperasi secara terpisah, dan itulah tepatnya yang membuat kemiskinan sulit diatasi dengan kebijakan sektoral (Suhendar et al., 2024). Hambatan finansial yang diatasi oleh program beasiswa tidak otomatis menghilangkan hambatan non-finansial yang didokumentasikan oleh Suhendar et al. (2024) dan Loen et al. (2024). Peningkatan infrastruktur sekolah di daerah tertinggal tidak akan efektif jika stagnasi ekonomi setempat terus menghalangi partisipasi anak, sebagaimana ditunjukkan oleh Suherman dan Sakti (2024). Penyediaan perangkat digital tidak menjamin learning outcome yang baik jika kondisi psikologis anak di rumah — yang dipengaruhi langsung oleh tekanan ekonomi keluarga — tidak ikut diperhatikan (Loen et al., 2024; Reardon, 2011). Dalam terminologi Alkire dan Foster (2011) tentang pengukuran kemiskinan multidimensi, kondisi ini adalah situasi di mana setiap dimensi deprivation memperbesar dampak dimensi lainnya — inilah yang kajian ini sebut sebagai *compounding disadvantage*, dan yang membedakan argumen kajian ini dari sekadar daftar masalah yang perlu diatasi satu per satu.

Implikasi terpenting dari argumen *compounding disadvantage* adalah bahwa efektivitas sebuah program intervensi tidak dapat dievaluasi secara terpisah dari dimensi-dimensi lain yang tidak ia tangani (Prasetyo & Nugroho, 2021). Program Indonesia Pintar yang dinilai berhasil menurunkan angka tidak bersekolah di beberapa daerah (Kemendikbud, 2023) mungkin akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar jika diintegrasikan dengan program yang mengatasi hambatan non-finansial, memperkuat kualitas sekolah di daerah miskin, dan menyediakan akses digital yang memadai secara bersamaan (Yanti & Lestari, 2025). World Bank (2023) dan UNESCO (2022) secara terpisah merekomendasikan pendekatan lintas sektor



yang mengintegrasikan intervensi pendidikan dengan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah, bukan program-program sektoral yang dijalankan oleh kementerian yang berbeda tanpa koordinasi substantif. Hanushek dan Woessmann (2020) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil memutus siklus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan hampir selalu melakukannya melalui pendekatan sistemik yang menyentuh kualitas sekolah, ketersediaan guru berkualitas, dan kondisi sosial-ekonomi di luar sekolah secara bersamaan.

Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, dominasi literatur berbahasa Indonesia dalam sampel berarti studi internasional tentang konteks Indonesia — misalnya laporan bilateral atau kajian komparatif ASEAN — kemungkinan tidak sepenuhnya terrepresentasikan (Xiao & Watson, 2019). Kedua, pendekatan tematik naratif yang digunakan tidak memungkinkan estimasi effect size gabungan seperti yang dapat dilakukan meta-analisis kuantitatif, sehingga besar dampak setiap dimensi tidak dapat dikuantifikasi secara presisi (Snyder, 2019; Paul & Criado, 2020).

## **SIMPULAN**

Kemiskinan memengaruhi partisipasi pendidikan di Indonesia melalui penyaringan ekonomi yang sistematis: pola penurunan APK dari SD (104,76%) ke SMA (84,13%) mencerminkan keputusan ekonomi keluarga yang mengakhiri pendidikan anak sebelum waktunya, bukan sekadar ketidakmauan bersekolah (Kemendikbud, 2023; Suhendar et al., 2024). Risiko putus sekolah meningkat secara prediktabel seiring dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah, dengan variasi regional yang signifikan menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang seragam tidak akan efektif merata di semua konteks lokal (Togatorop et al., 2024; Boari et al., 2024). Siklus yang dihasilkan bersifat trans-generasional: anak yang meninggalkan sistem pendidikan lebih awal memasuki pasar kerja dalam posisi yang lebih lemah, dan keterbatasan itu terus membatasi pilihan pendidikan anak-anak mereka sendiri di masa depan (Sihombing et al., 2024; Hanushek & Woessmann, 2020).

Kemiskinan tidak hanya membatasi akses, tetapi juga menentukan kualitas pendidikan yang diterima: sekolah di area dengan konsentrasi kemiskinan tinggi cenderung memiliki fasilitas lebih terbatas dan tenaga pendidik yang kurang berkualifikasi, sementara tekanan ekonomi keluarga secara bersamaan memengaruhi kondisi psikologis anak yang menentukan kapasitas belajarnya (Afrianto, 2024; Darmuji et al., 2024; Loen et al., 2024). Kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan digital memperburuk kondisi ini secara multiplikatif: anak dari daerah tertinggal dengan kemiskinan tinggi tidak hanya menghadapi sekolah berkualitas rendah, tetapi juga tidak memiliki akses ke sumber belajar alternatif berbasis digital yang mungkin bisa mengkompensasi keterbatasan instruksi di sekolah (Togatorop et al., 2024; Alya et al., 2024; UNESCO, 2022). Kontribusi utama kajian ini bukan pada temuan baru tentang masing-masing dimensi — yang sudah terdokumentasi dengan cukup baik dalam literatur yang ada (Firmansyah & Khairunnisa, 2023; Widiasanti et al., 2023) — melainkan pada argumentasi bahwa kelima dimensi itu beroperasi sebagai satu sistem compounding disadvantage, dan bahwa memahami pola ini adalah prasyarat bagi kebijakan yang benar-benar efektif, bukan hanya bermaksud baik (Alkire & Foster, 2011). Agenda penelitian selanjutnya yang paling mendesak mencakup meta-analisis kuantitatif untuk menghasilkan estimasi effect size yang presisi, studi longitudinal yang mengikuti anak dari keluarga miskin dari SD hingga pasar kerja untuk memahami trajektori utuh compounding disadvantage, dan evaluasi eksperimental dari program intervensi multi-dimensi yang secara sengaja menyentuh lebih dari satu lapisan kerugian secara bersamaan (Snyder, 2019; Paul & Criado, 2020).

Mengintegrasikan kelima dimensi itu dalam satu kerangka kebijakan — bukan sekadar menjalankan program-program paralel dari kementerian yang berbeda tanpa koordinasi substantif — adalah tantangan tata kelola yang jauh melampaui soal anggaran (World Bank,



2023; UNESCO, 2022). Yang paling dibutuhkan mungkin bukan lebih banyak program, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendidikan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dan bahwa desain intervensi yang mengabaikan mekanisme compounding disadvantage hanya akan menghasilkan perubahan yang tampak nyata di atas kertas tetapi tidak terasa di kehidupan nyata keluarga miskin (Alkire & Foster, 2011; Prasetyo & Nugroho, 2021).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Samawa atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan selama proses penyusunan kajian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Y. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2023. *Jurnal Akuntansi*, 4
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 9
- Alya, R., Tiara, V., Liska, F., & Hafizi, M. Z. (2024). Poverty as a structural barrier to educational equity in Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 5
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase penduduk miskin Indonesia Maret 2024. *Berita Resmi Statistik*, No. 49/07/Th. XXVII. Badan Pusat Statistik.
- Boari, Y., Syofya, H., Agustina, I., Rohman, M. F., & Irawaty, R. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). Sage Publications.
- Darmuji, D., Alawiyah, T., & Hasanah, K. (2024). Dampak kualitas pendidikan dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5
- Firmansyah, A., & Khairunnisa, D. (2023). Dampak pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan analisis data panel. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: The role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 2
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education and economic growth. Dalam S. Bradley & C. Green (Eds.), *The economics of education* (2nd ed., hlm. 171–182). Academic Press.
- Haq, I., Djuniarsah, M., & Syafri. (2024). Pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). *Statistik pendidikan 2022/2023*. Pusdatin Kemendikbudristek.
- Loen, H. S. Z., Azahra, S. A. S., Yulianti, H., et al. (2024). Kemiskinan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 1
- Nurrahmah, A., Ningsih, R. S., Nurdiansyah, N. D., Elsabela, D., & Puspita, A. M. I. (2024). Menelusuri akar kemiskinan di Indonesia: Strategi dan harapan untuk masa depan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 2
- Prasetyo, B., & Nugroho, S. (2021). Siklus kemiskinan dan pendidikan di Indonesia. *Jurnal*



*Ekonomi Pembangunan, 1*

- Reardon, S. F. (2011). The widening academic achievement gap between the rich and the poor. Dalam R. Murnane & G. Duncan (Eds.), *Whither opportunity? Rising inequality, schools, and children's life chances* (hlm. 91–115). Russell Sage Foundation.
- Sholeh, M. (2023). Pengaruh pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan akses informasi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 1*
- Sihombing, A. E., Hasibuan, Z. H., Situngkir, D., Lumbangaol, R. Y., & Ardhana, M. B. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia 2004–2023. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 1*
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 1*
- Suhendar, F. A., Sari, R. V., Pangesti, T., Putra, Z. M. G., & Santoso, A. P. A. (2024). The impact of poverty in Indonesia on education. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 8*
- Suherman, R., & Sakti, R. K. (2024). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia 2013–2022. *Journal of Development Economic and Social Studies, 3*
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia 2015–2021. *Ecoplan: Journal of Economics and Planning, 6*
- Togatorop, R. S., Sinaga, M. H. P., Putri, N. A., Hafifah, R., & Nuraina, A. L. (2024). Dampak tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara 2017–2021. *Jurnal Simki Economic, 7*
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.
- Widiasanti, I., Abdul, A. V., Nirwana, A., & Arlita, A. D. (2023). Ancaman melawan putus sekolah dengan dilema kualitas pendidikan Indonesia. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 7*
- World Bank. (2023). *Indonesia education sector assessment: Equity and quality in a time of recovery*. World Bank Group.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research, 3*
- Yanti, H., & Lestari, H. (2025). PGI-triangle: Kemiskinan dan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 9*